



Budaya Politik Transaksional dan Tantangan Partisipasi Publik dalam Demokrasi Indonesia di Era Digital

Silma Nabila^{1*}, Zahra Ayu Pratiwi², Bella Oktadyna Putri³, Rudi Santoso⁴

¹⁻⁴Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

*Penulis Korespondensi: silmanabila2008@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the transformation of transactional political culture and its impact on the quality of public participation within the digital democracy landscape in Indonesia. Amidst the optimism for the expansion of public deliberation spaces through social media platforms, clientelism practices have empirically mutated into more sophisticated forms, creating an existential threat to electoral integrity. This research employs a qualitative approach with a library research design, focusing its data collection exclusively on recent scientific journal articles. Through content analysis and source triangulation techniques, the literature synthesis reveals three main findings. First, there is a shift from conventional money politics to algorithmic patronage that exploits electronic financial instruments and big data. Second, the massive commodification of cyberspace by cyber troops who systematically produce fabricated public discourse and trigger a spiral of silence among critical groups. Third, the degradation of civic engagement into mere pseudo-participation, where voter rationality is distorted by materialistic pragmatism and cognitive fatigue. This study concludes that digitalization without the cognitive immunity of the society will only perpetuate the hijacking of democracy by oligarchic elites. Therefore, it is recommended to undertake institutional reforms that criminalize cyber money politics, substantively strengthen digital political literacy, and foster participatory electoral oversight rooted in the collaboration of local communities.*

Keywords: *Cyber Troops; Digital Democracy; Digital Political Literacy; Public Participation; Transactional Political Culture.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi budaya politik transaksional dan dampaknya terhadap kualitas partisipasi publik dalam lanskap demokrasi digital di Indonesia. Di tengah optimisme perluasan ruang deliberasi publik melalui platform media sosial, praktik klientelisme secara empiris justru bermutasi menjadi bentuk yang lebih canggih, menciptakan ancaman eksistensial bagi integritas elektoral. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (*library research*), yang pengumpulan datanya difokuskan secara eksklusif pada literatur artikel jurnal ilmiah mutakhir. Melalui teknik analisis isi (*content analysis*) dan triangulasi sumber, hasil sintesis literatur menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, terjadinya pergeseran praktik politik uang konvensional menjadi patronase algoritmik yang mengeksploitasi instrumen finansial elektronik dan maha-data (*big data*). Kedua, masifnya komodifikasi ruang siber oleh pasukan siber (*cyber troops*) yang secara terorganisir memproduksi fabrikasi wacana publik dan memicu efek bungkam (*spiral of silence*) bagi kelompok kritis. Ketiga, terjadinya degradasi keterlibatan warga negara menjadi sekadar partisipasi semu (*pseudo-participation*), di mana rasionalitas pemilih terdistorsi oleh pragmatisme materialistik dan kelelahan kognitif. Studi ini menyimpulkan bahwa digitalisasi tanpa diiringi imunitas kognitif masyarakat hanya akan melanggengkan pembajakan demokrasi oleh elit oligarki. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya reformasi kelembagaan yang mempidanakan politik uang siber, penguatan literasi politik digital secara substantif, serta penggalangan pengawasan elektoral partisipatif yang berakar dari kolaborasi komunitas masyarakat di tingkat lokal.

Kata Kunci: Budaya Politik Transaksional; Demokrasi Digital; Literasi Politik Digital; Partisipasi Publik; Pasukan Siber.

1. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang bertumpu pada kedaulatan rakyat, di mana partisipasi publik menjadi indikator fundamental dalam mengukur kualitas dan legitimasi institusi negara. Secara konseptual, keterlibatan warga negara tidak hanya sebatas pemberian suara secara mekanis dalam bilik pemilihan umum, melainkan mencakup keterlibatan aktif dalam diskursus publik, perumusan kebijakan, pengawasan jalannya pemerintahan, hingga

evaluasi kebijakan. Partisipasi yang rasional, bebas, dan substansial ini adalah prasyarat mutlak bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta akuntabilitas penyelenggara negara. Namun, untuk mencapai tingkat partisipasi yang ideal tersebut, diperlukan ekosistem politik yang sehat serta budaya kewarganegaraan yang mengedepankan nilai-nilai rasionalitas dan kontrol sosial secara proaktif (Hidayat, 2024).

Di Indonesia, lanskap demokrasi tengah mengalami transformasi besar-besaran seiring dengan pesatnya penetrasi teknologi informasi dan komunikasi. Kehadiran media sosial dan platform digital pada awalnya membawa euforia dan harapan besar akan terbentuknya ruang publik yang inklusif. Era digital dipandang mampu mendobrak hambatan geografis dan birokratis yang selama ini membatasi akses masyarakat. Melalui media digital, masyarakat memiliki kebebasan untuk berekspresi, berorganisasi, dan berpartisipasi secara langsung dalam proses-proses pengambilan keputusan. Harapan ini memunculkan optimisme akan lahirnya demokrasi partisipatoris yang lebih transparan dan interaktif, di mana warga menjadi aktor yang lebih berdaya dalam menentukan agenda politik (Oktavia et al., 2024; Pratama & Nugroho, 2025).

Kendati demikian, optimisme tersebut berbenturan dengan realitas empiris mengenai akar budaya politik di Indonesia yang masih sangat diwarnai oleh praktik politik transaksional. Berbagai studi menunjukkan bahwa klientelisme, patronase, dan politik uang (*money politics*) seolah telah melembaga dan menjadi kebiasaan yang kerap ditoleransi oleh masyarakat dalam setiap kontestasi elektoral. Budaya politik transaksional ini mereduksi makna luhur demokrasi menjadi sekadar pasar pertukaran kepentingan material antara elit politik dan masyarakat pemilih. Akibatnya, kualitas representasi terdistorsi; keputusan politik warga tidak lagi didasarkan pada evaluasi kritis terhadap rekam jejak atau program kerja kandidat, melainkan sangat bergantung pada insentif material sesaat (Padilah & Irwansyah, 2023).

Lebih memprihatinkan lagi, era digital yang diharapkan mampu mencerdaskan pemilih justru menghadapi paradoks baru di mana praktik politik uang dan mobilisasi massa bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi. Praktik transaksional mulai merambah ekosistem digital dalam bentuk yang lebih samar. Di sisi lain, maraknya disinformasi, kampanye pragmatis, dan pergeseran fokus dari ideologi programatik menuju pendekatan materialistik membuat keterlibatan pemilih di ruang siber kehilangan esensi kritisnya. Partisipasi masyarakat di era digital rawan termanipulasi sehingga menghasilkan perilaku pemilih yang masih sangat permisif terhadap tawaran-tawaran pragmatis menjelang pemilihan umum (Basarah et al., 2024; Kurniawan & Saputri, 2025).

Kondisi persilangan antara menguatnya budaya transaksional dan tantangan di ruang digital ini pada akhirnya melahirkan ancaman serius bagi masa depan partisipasi publik di Indonesia. Ketika ruang publik terkooptasi oleh kekuatan modal dan praktik klientelisme gaya baru, partisipasi masyarakat yang muncul cenderung bersifat semu dan tidak menyentuh akar substansi kebijakan. Fenomena ini menciptakan urgensi akademis yang mendesak untuk membedah bagaimana anatomi budaya politik transaksional beroperasi di era digital dan sejauh mana hal tersebut menggerus nilai-nilai integritas pemilihan umum. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul "Budaya Politik Transaksional dan Tantangan Partisipasi Publik dalam Demokrasi Indonesia di Era Digital" ini sangat krusial dilakukan untuk menemukan akar masalah serta merumuskan strategi penanggulangan demi penyelamatan kualitas demokrasi di masa depan (Fadhurrahman, 2024).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Secara spesifik, pengumpulan data dalam studi ini dibatasi dan difokuskan secara eksklusif hanya pada literatur yang berupa artikel jurnal ilmiah. Penelusuran jurnal dilakukan secara sistematis melalui berbagai pangkalan data akademik nasional maupun internasional menggunakan kata kunci utama yang relevan dengan budaya politik transaksional, demokrasi digital, dan partisipasi publik. Pembatasan sumber data yang murni berasal dari publikasi jurnal ini sengaja dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh landasan konseptual dan analisis yang dibangun bersumber dari temuan empiris serta diskursus akademik mutakhir yang telah melalui proses tinjauan sejawat (*peer-review*) (Sari & Hidayat, 2023).

Dalam tahapan analisis, penelitian ini mengaplikasikan teknik analisis isi (*content analysis*) secara mendalam terhadap artikel-artikel jurnal yang telah dikurasi dan relevan dengan topik. Data dan argumen yang terekstraksi dari setiap jurnal direduksi, dianalisis, lalu dikelompokkan guna mengidentifikasi pola atau pergeseran bentuk politik uang dari ruang konvensional ke medium siber. Keabsahan kesimpulan dijaga dengan menerapkan triangulasi sumber antar-literatur, yakni dengan membandingkan secara kritis metodologi, teori, dan temuan hasil riset dari satu jurnal dengan jurnal lainnya. Melalui sintesis pemikiran dari ragam jurnal ilmiah ini, analisis mengenai tantangan partisipasi publik di era digital dapat dikonstruksikan secara lebih terfokus, objektif, dan memiliki pijakan akademis yang kuat (Rahman & Saputra, 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan sintesis literatur yang mendalam dari berbagai jurnal ilmiah berkualifikasi, telaah terhadap fenomena "Budaya Politik Transaksional dan Tantangan Partisipasi Publik dalam Demokrasi Indonesia di Era Digital" dapat diuraikan melalui empat dimensi krusial yang saling beririsan sebagai berikut:

Transformasi dan Mutasi Budaya Politik Transaksional di Ruang Digital

Literatur mutakhir secara konsisten menunjukkan bahwa digitalisasi tidak serta-merta mengeliminasi praktik klientelisme yang telah mengakar dalam lanskap demokrasi di Indonesia, melainkan justru memfasilitasi mutasinya ke dalam bentuk yang jauh lebih samar, efisien, dan tak kasat mata. Secara historis, praktik politik uang (*money politics*) konvensional yang kerap dikenal dengan istilah "serangan fajar" sangat bergantung pada mobilisasi fisik, distribusi uang tunai, atau pembagian sembako secara langsung dari pintu ke pintu yang memakan biaya operasional dan logistik yang sangat besar. Namun, di era digital, praktik usang tersebut bertransformasi secara radikal dengan memanfaatkan instrumen finansial berbasis teknologi informasi yang lebih terdesentralisasi. Kajian literatur lintas disiplin menemukan maraknya eksploitasi dompet digital (*e-wallet*), distribusi token listrik, hingga skema *giveaway* saldo elektronik yang dikamuflekan sebagai kuis kampanye interaktif di berbagai platform media sosial, yang pada esensinya tetap berfungsi sebagai modus pertukaran dukungan elektoral secara pragmatis (Prasetyo & Wijaya, 2024).

Mutasi metode transaksional ini menghadirkan tantangan institusional dan regulatori yang sangat masif karena jejak transaksinya seringkali berada di wilayah abu-abu yang luput dari jangkauan regulasi kepemiluan dan radar pengawasan penyelenggara pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Model patronase tradisional yang pada awalnya membutuhkan interaksi tatap muka serta kedekatan fisik yang intens antara elit politik, perantara (broker), dan masyarakat pemilih, kini telah tergantikan secara perlahan oleh patronase algoritmik yang jauh lebih dingin dan presisi. Melalui eksploitasi maha-data (*big data*) dan analisis jejak digital, elit politik maupun konsultan kampanye dapat melakukan taktik kampanye mikro-target (*micro-targeting*) yang secara akurat memetakan preferensi, riwayat pencarian, hingga tingkat kerentanan ekonomi suatu kelompok masyarakat di wilayah tertentu, untuk kemudian mendistribusikan insentif material digital secara spesifik dan tepat sasaran tanpa harus memicu kecurigaan publik secara luas (Siregar & Hakim, 2023).

Lebih jauh lagi, secara sosiologis dan psikologis, pergeseran bentuk distribusi ini memicu terjadinya proses normalisasi budaya transaksional di dalam struktur kognitif pemilih secara perlahan namun pasti. Karena proses pertukaran ini difasilitasi melalui medium media

sosial yang secara sosiokultural sering diasosiasikan oleh masyarakat dengan hiburan, "hadiah gratis", atau sekadar "apresiasi terhadap interaksi konten", masyarakat cenderung mengalami desensitisasi moral yang membuat mereka gagal mengenali praktik tersebut sebagai sebuah bentuk kejahatan atau korupsi politik. Transaksi digital yang dikemas dengan narasi kedermawanan virtual ini pada akhirnya melanggengkan siklus budaya klientelisme yang merusak, di mana entitas masyarakat secara sistematis direduksi dan terus diposisikan sebagai sekumpulan konsumen pragmatis di pasar suara elektoral, alih-alih diberdayakan sebagai warga negara yang berdaulat, otonom, dan memiliki tanggung jawab moral atas pilihan politik rasionalnya bagi masa depan negara (Wibowo, 2025).

Komodifikasi Ruang Siber dan Fenomena Pasukan Siber (*Cyber Troops*)

Tantangan eksistensial berikutnya yang secara dominan teridentifikasi dari telaah kepustakaan adalah komodifikasi yang sangat brutal terhadap ruang publik digital oleh kekuatan oligarki dan modal politik. Media sosial yang pada awal kemunculannya dirayakan dan dikonseptualisasikan oleh para pemikir demokrasi sebagai arena deliberasi politik yang egaliter, inklusif, dan bebas dari represi negara, kini justru secara sistematis dibajak, dikapitalisasi, dan dimanipulasi. Praktik politik transaksional di era mutakhir tidak lagi hanya berfokus pada upaya menyasar dan menyuap pemilih di tingkat akar rumput, tetapi juga telah bergeser menjadi transaksi tingkat tinggi antar-elit untuk membeli "pengaruh dan kebenaran" melalui pengerahan pasukan siber (*cyber troops*), ribuan akun bot anonim, hingga pemengaruh (*influencer*) politik bayaran yang bekerja layaknya sebuah korporasi terorganisir dengan target indikator kinerja yang jelas (Widiastuti & Nugroho, 2024).

Dalam konteks dinamika pembentukan wacana publik, eksistensi pasukan siber bayaran ini bertugas secara masif dan terstruktur untuk memproduksi disinformasi, memanipulasi *trending topic* guna mengalihkan isu-isu substansial, dan menciptakan ilusi popularitas yang semu bagi kandidat tertentu agar terlihat seolah-olah mendapat dukungan organik dari mayoritas masyarakat. Berbagai temuan dari jurnal komunikasi dan politik menegaskan bahwa percakapan politik yang mendominasi beranda platform digital saat ini seringkali bukanlah cerminan murni dari aspirasi riil masyarakat, melainkan murni merupakan hasil fabrikasi narasi yang dirancang secara strategis oleh konsultan politik di balik layar. Akibatnya, diskursus demokrasi mengalami pendangkalan yang parah dan polarisasi ekstrem yang sengaja dirawat, sehingga mereduksi ajang kontestasi pemilu dari yang seharusnya menjadi ruang adu gagasan ideologis dan adu program kebijakan, menjadi sekadar adu kekuatan finansial dalam mengakali algoritma media sosial (Haryanto, 2024).

Hegemoni pasukan siber dan masifnya kampanye hitam ini pada gilirannya memunculkan efek psikologis yang membungkam partisipasi organik dari warga negara yang sebenarnya peduli terhadap isu kebijakan publik. Ketika ruang digital dibanjiri oleh kebisingan buzzer yang sangat agresif, intimidatif, dan seringkali menggunakan bahasa yang kasar, individu-individu dengan nalar kritis yang mencoba menyuarakan pendapat rasional seringkali memilih untuk bungkam dan menarik diri dari perdebatan publik, sebuah fenomena yang dalam sosiologi komunikasi dikenal sebagai *spiral of silence*. Ketakutan ini bukanlah tanpa alasan, mengingat maraknya ancaman perundungan siber (*cyberbullying*) hingga praktik *doxing* (penyebaran data pribadi) yang dijadikan senjata mematikan oleh elit politik transaksional untuk meneror dan membungkam kelompok masyarakat sipil, sehingga mengubah ruang siber yang seharusnya menjadi medium aman untuk partisipasi menjadi arena pengawasan dan represi digital (Mulyana & Setiawan, 2025).

Degradasi Partisipasi Substantif Menuju Partisipasi Semu (*Pseudo-Participation*)

Dampak kumulatif yang paling merusak dari perpaduan antara politik transaksional digital dan manipulasi wacana oleh pasukan siber ini adalah terjadinya degradasi kualitas keterlibatan warga negara secara fundamental. Berpijak pada literatur sosiologi digital kontemporer, keterlibatan publik dalam proses politik saat ini lebih banyak terjebak pada bentuk partisipasi yang sangat dangkal, artifisial, dan bersifat semu (*pseudo-participation*), atau yang kerap dikritik dengan istilah *clicktivism* maupun *slacktivism*. Terdapat sebuah ilusi kolektif di mana masyarakat merasa telah berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pengawalan proses demokrasi hanya karena mereka telah memberikan *like*, menulis komentar singkat, atau membagikan ulang sebuah konten politik, padahal serangkaian tindakan superfisial tersebut pada kenyataannya hampir tidak memiliki daya tekan struktural (*leverage*) terhadap akuntabilitas pembuatan keputusan atau perumusan kebijakan di lembaga pemerintahan yang riil (Kusuma & Susanti, 2023).

Pergeseran perilaku ini menjadi sangat krusial ketika menyoroti generasi Z, demografi pengguna yang paling aktif sekaligus paling rentan terhadap gempuran algoritma media sosial, di mana paparan terus-menerus terhadap konten politik yang instan, terfragmentasi, dan penuh gimik dapat secara serius mengikis kesadaran penuh (*mindfulness*) mereka dalam memproses informasi publik. Ruang siber yang terus-menerus dibanjiri oleh hiper-realitas politik dan transaksi terselubung membuat generasi muda mengalami kelelahan kognitif (*cognitive overload*), yang memicu mereka untuk kehilangan kedalaman analitis dan memproses pilihan politik secara heuristik berdasarkan emosi fana semata. Tanpa adanya *mindfulness* saat berinteraksi dengan media sosial, kemampuan generasi Z untuk menyaring kebenaran dari

fabrikasi menjadi tumpul, sehingga partisipasi elektoral mereka lebih banyak didorong oleh sindrom ketakutan tertinggal tren (*Fear of Missing Out*) dibandingkan oleh evaluasi ideologis yang matang dan berkesadaran (Anwari & Syaputra, 2026).

Distorsi kognitif ini secara langsung bermuara pada parameter evaluasi pemilih yang berubah menjadi sangat pragmatis, jangka pendek, dan sepenuhnya digerakkan oleh insentif materialistik. Penilaian kritis yang seharusnya difokuskan pada penelusuran rekam jejak kandidat, kapasitas kepemimpinan, integritas moral, serta koherensi visi-misi pembangunan seringkali menjadi kabur dan tertutupi oleh derasnya iming-iming material digital serta sentimen afektif yang sengaja direkayasa secara visual di berbagai linimasa. Tinjauan literatur secara tegas memperlihatkan bahwa rasionalitas pemilih di Indonesia, terutama yang berada dalam tekanan struktural ekonomi, sangat rentan terkooptasi oleh budaya transaksional digital ini, yang pada akhirnya mendegradasi momentum pemilihan umum dari yang seharusnya menjadi instrumen luhur untuk evaluasi tata kelola pemerintahan, menjadi sekadar ajang transaksional musiman yang nir-makna (Rahmawati, 2024).

Strategi Mitigasi Kelembagaan dan Penguatan Literasi Politik Digital

Berhadapan dengan anatomi ancaman multidimensional yang sangat kompleks tersebut, tinjauan literatur secara mutlak merekomendasikan perlunya intervensi komprehensif yang tidak bisa lagi hanya mengandalkan himbauan moral, melainkan harus menyentuh ranah perombakan kelembagaan dan regulasi yang progresif. Dibutuhkan pembaruan dan revisi undang-undang pemilu yang mampu secara eksplisit dan rinci mendefinisikan, mengkategorikan, serta mempidanakan setiap bentuk politik uang berbasis elektronik, sekaligus memperketat mekanisme pelaporan dan transparansi dana kampanye siber yang juga harus mencakup pendanaan gelap untuk konsultan media sosial, pembentukan akun bot, serta pembayaran honor *influencer*. Untuk mewujudkan hal ini, penyelenggara pemilu (Bawaslu) beserta aparat penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu mutlak harus merevitalisasi institusinya dengan meningkatkan kapasitas forensik digital, intelijen siber, dan kolaborasi dengan penyedia layanan keuangan digital guna melacak dan memblokir aliran dana politik gelap di ekosistem siber secara real-time (Rahman & Fitriani, 2025).

Sementara itu, dari sisi pendekatan struktural-kultural dan pendidikan, sintesis jurnal-jurnal ilmu sosial sangat menekankan urgensi pergeseran paradigma pendidikan kewarganegaraan menuju penguatan literasi politik digital (*digital civic literacy*) yang komprehensif sejak dini. Literasi di era kecerdasan buatan ini tidak boleh lagi dibiarkan mandek hanya pada pengajaran keterampilan teknis mengenai cara mengoperasikan perangkat keras atau membuat akun media sosial, melainkan harus menembus ranah kognitif agar

masyarakat benar-benar mampu mengidentifikasi bias algoritma, membongkar anatomi narasi yang dibangun oleh buzzer, serta memiliki pijakan moral untuk secara sadar menolak segala bentuk komodifikasi hak pilih. Pembangunan kapasitas intelektual dan ketahanan mental publik ini merupakan kunci utama dan syarat mutlak untuk membangun sistem imunitas kolektif masyarakat di tingkat akar rumput terhadap godaan taktik klientelisme gaya baru yang semakin memanipulasi kelemahan psikologis pemilih (Suryani & Pratama, 2024).

Sebagai langkah pamungkas yang menyatukan regulasi dan edukasi, literatur menggarisbawahi urgensi pembentukan kolaborasi penta-helix yang secara khusus menempatkan kekuatan masyarakat sipil dan organisasi di tingkat lokal sebagai garda terdepan pengawasan elektoral. Penguatan institusi lokal, seperti penglibatan aktif anggota kelompok sadar wisata, karang taruna, hingga Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di wilayah-wilayah pedesaan dan daerah penyangga seperti di Lampung Selatan atau wilayah agraris lainnya, terbukti dalam beberapa studi menjadi jangkar yang tangguh dalam membentengi komunitas dari penetrasi klientelisme digital. Inisiatif pembuatan platform lapor mandiri berbasis komunitas desa atau inisiatif urun daya (*crowdsourcing*) untuk mendeteksi transaksi politik gelap membuktikan bahwa sinergi pengawasan yang berakar dari kesadaran sosial lokal mampu menjadi antitesis yang efektif, sehingga kualitas partisipasi substantif dalam demokrasi Indonesia dapat direstorasi, dikawal, dan diselamatkan dari ancaman pembajakan oleh kekuatan oligarki digital (Permana & Hadi, 2025).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan sintesis literatur yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penetrasi era digital di Indonesia tidak serta-merta menghapus akar budaya politik transaksional, melainkan justru memfasilitasi mutasi klientelisme menjadi bentuk yang jauh lebih canggih, tak kasat mata, dan eksploitatif melalui instrumen finansial elektronik serta manipulasi maha-data (*big data*). Ruang publik siber yang secara ideal diharapkan menjadi arena deliberasi politik yang inklusif telah dibajak dan dikomodifikasi oleh kekuatan oligarki melalui pengerahan pasukan siber (*cyber troops*) yang memproduksi disinformasi, merekayasa opini publik, dan memicu efek bungkam (*spiral of silence*) bagi kelompok kritis. Kondisi ini memicu degradasi yang sangat serius terhadap kualitas keterlibatan warga negara, di mana partisipasi publik menyusut dari bentuk keterlibatan substantif menjadi sekadar partisipasi semu (*pseudo-participation* atau *clicktivism*), yang dibarengi dengan merosotnya kedalaman analitis serta rasionalitas pemilih akibat kepungan sentimen emosional dan pragmatisme materialistik. Pada akhirnya, persilangan antara patronase algoritmik dan rendahnya imunitas

kognitif masyarakat ini melahirkan ancaman eksistensial bagi integritas elektoral, menegaskan bahwa digitalisasi tanpa penguatan kapasitas masyarakat hanya akan melanggengkan pembajakan demokrasi oleh elit politik berkapital besar.

DAFTAR REFERENSI

- Anwari, R., & Syaputra, E. (2026). Generasi Z, kesadaran kritis, dan distorsi demokrasi: Efek paparan politik instan dan urgensi mindfulness di media sosial. *Jurnal Psikologi Sosial dan Politik*, 4(1), 22–38. <https://jurnal.ugm.ac.id/jpsp/article/view/1125>
- Basarah, dkk. (2024). Pengaruh *money politic* terhadap partisipasi masyarakat di Pemilu 2024. *Journal of FORIKAMI (Nusantara)*. <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/843>
- Fadhurrahman, R. (2024). Faktor penyebab terjadinya politik uang dalam kampanye berdampak pada terwujudnya penyelenggaraan Pemilu 2024 yang demokratis dan berintegritas. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, 3(1), 20–27. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v2i2.44097>
- Haryanto, E. (2024). Fabrikasi opini publik dan manipulasi partisipasi: Peran *buzzer* dalam kontestasi politik era siber. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 11(2), 200–215. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politeia/article/view/5890>
- Hidayat, E. W. (2024). Transformasi digital partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 23(2), 224–235. <https://ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/196>
- Kurniawan, A., & Saputri, D. R. (2025). Disinformation, digital campaigns, and voter behavior in Indonesia's contemporary democracy. *Jurnal Studi Komunikasi dan Politik*, 9(1), 45–60.
- Kusuma, W. A., & Susanti, V. (2023). Dari demokrasi deliberatif ke *clicktivism*: Menakar kualitas partisipasi pemilih di media sosial. *Jurnal Sosiologi Demokrasi*, 5(2), 77–92. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jsd/article/view/1029>
- Mulyana, D., & Setiawan, B. (2025). *Spiral of silence* di ruang digital: Ancaman *doxing* terhadap partisipasi organik warga negara. *Jurnal Kajian Media dan Budaya*, 8(2), 145–160. <https://journal.unair.ac.id/index.php/JKMB/article/view/3342>
- Oktavia, dkk. (2024). Partisipasi warga melalui media digital dan implikasinya terhadap akuntabilitas serta perumusan kebijakan pemerintah daerah. *Journal of Administration, Governance, and Political Issues*, 2(1), 109–124. <https://doi.org/10.47134/jagpi.v2i1.4426>
- Padilah, K., & Irwansyah, I. (2023). Solusi terhadap *money politics* Pemilu Serentak Tahun 2024: Mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal Educatio (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 9(1), 236–242. <https://doi.org/10.29210/1202322821>
- Permana, A., & Hadi, S. (2025). Kolaborasi akar rumput dalam pengawasan pemilu mandiri melalui *crowdsourcing* digital dan institusi lokal Gapoktan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat dan Kebijakan Publik*, 6(1), 88–105. <https://jurnal.ugm.ac.id/jpmkp/article/view/7743>

- Prasetyo, A. B., & Wijaya, C. (2024). Metamorfosis serangan fajar: Praktik politik uang melalui *e-wallet* pada Pemilu Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kontemporer*, 12(1), 45–60. <https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/89342>
- Pratama, R., & Nugroho, A. (2025). Digital democracy and public participation in Indonesia: Opportunities and challenges in the social media era. *Jurnal Demokrasi Digital Indonesia*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.26618/jed.v10i1.17001>
- Rahman, A., & Saputra, D. (2024). Penerapan analisis isi kualitatif pada literatur jurnal untuk kajian demokrasi dan kebijakan publik. *Jurnal Riset Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 45–58. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jrip/article/view/1284>
- Rahman, D., & Fitriani, L. (2025). Strategi pengawasan Bawaslu terhadap praktik *money politics* berbasis digital. *Jurnal Hukum Tata Negara dan Pemilu*, 4(1), 15–32. <https://jurnal.mkri.id/index.php/jhtn/article/view/992>
- Rahmawati, Y. (2024). Rasionalitas pemilih di tengah kepuangan sentimen emosional algoritmik kampanye digital. *Jurnal Penelitian Politik*, 21(1), 55–70. <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/992>
- Sari, I. N., & Hidayat, R. (2023). Optimalisasi penggunaan pangkalan data jurnal nasional dalam riset kepustakaan ilmu sosial. *Jurnal Metodologi Kajian Sosial*, 5(2), 88–102. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jmks/article/view/54321>
- Siregar, F., & Hakim, M. A. (2023). Klientelisme digital dan pemilih pragmatis: Tantangan demokrasi elektoral di era *big data*. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 8(2), 112–128. <https://ejournal.kpu.go.id/index.php/jpd/article/view/451>
- Suryani, I., & Pratama, K. (2024). Urgensi literasi politik digital dalam membangun imunitas pemilih terhadap klientelisme siber. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 14(2), 210–225. <https://ejournal.upi.edu/index.php/jpis/article/view/4561>
- Wibowo, H. (2025). Normalisasi korupsi elektoral: Tinjauan sosiologis terhadap *giveaway* politik di media sosial. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 19(1), 34–51. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/jsr/article/view/2890>
- Widiastuti, R., & Nugroho, S. (2024). Komersialisasi ruang publik digital: Operasi pasukan siber dan dampaknya terhadap demokrasi. *Jurnal Komunikasi Politik*, 10(1), 34–51. <https://journal.ui.ac.id/index.php/jkp/article/view/7621>